



INDONESIA  
DEVELOPMENT  
FORUM

INSPIRE • IMAGINE • INNOVATE



KNOWLEDGE  
SECTOR INITIATIVE



Indonesia Development Forum 2017

# Fighting Inequality for Better Growth

Jakarta, 9-10 August 2017



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

# **INDONESIAN DEVELOPMENT FORUM (IDF)**

**Jakarta, 10 Agustus 2017**



**Ir. H. JOKO WIDODO**  
*Presiden Republik Indonesia*



**TJAHJO KUMOLO, SH.**  
*Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia*



**Drs. H. M. JUSUF KALLA**  
*Wakil Presiden Republik Indonesia*

## **NAWA CITA**

**2014 - 2019**

- 1. MENGHADIRKAN KEMBALI NEGARA UNTUK MELINDUNGI SEGENAP BANGSA DAN MEMBERIKAN RASA AMAN PADA SELURUH WARGA NEGARA**
- 2. MEMBUAT PEMERINTAH TIDAK ABSEN DENGAN MEMBANGUN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BERSIH, EFEKTIF, DEMOKRATIS, DAN TERPERCAYA**
- 3. MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN DENGAN MEMPERKUAT DAERAH-DAERAH DAN DESA DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN**
- 4. MENOLAK NEGARA LEMAH DENGAN MELAKUKAN REFORMASI SISTEM DAN PENEGAKAN HUKUM YANG BEBAS KORUPSI, BERMARTABAT DAN TERPERCAYA**
- 5. MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MANUSIA INDONESIA**
- 6. MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS RAKYAT DAN DAYA SAING DI PASAR INTERNASIONAL**
- 7. MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN EKONOMI DENGAN MENGERAKAN SEKTOR STRATEGIS EKONOMI DOMESTIK**
- 8. MELAKUKAN REVOLUSI KARAKTER BANGSA**
- 9. MEMPERTEGUH KE-BHINEKAAN DAN MEMPERKUAT RESTORASI SOSIAL INDONESIA**

# ***PEMBANGUNAN DAERAH***



# PEMBANGUNAN DAERAH

Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.

**Pasal 263 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi dan prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.**

RKPD 2018 menjadi landasan penyusunan R-APBD Tahun 2018, setelah dibahas bersama seluruh pemangku kepentingan.

# PELAKU PEMBANGUNAN

PEMDA DENGAN KEOTONOMIANNYA,  
OPD, APBD/ POTENSI LAINNYA

PUSAT  
(K/L)  
DENGAN  
KEBIJAKAN  
SERTA  
APBN/  
POTENSI  
LAINNYA



SWASTA  
DENGAN  
SEGALA  
POTENSINYA

AKADEMISI/ MASYARAKAT  
DENGAN SEGALA POTENSINYA



# PENCAPAIAN TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL



01

Menjamin sinergitas sasaran pokok pembangunan dan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMN menjadi prioritas dalam RPJMD terkait

02

Harmonisasi hubungan pusat-daerah dan antardaerah dalam rangka upaya pencapaian sasaran pokok pembangunan nasional

03

Optimalisasi penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan

04

Penyesuaian alokasi anggaran pembangunan pusat dan daerah

05

Optimalisasi potensi dan keanekaragaman daerah



**PENYELARASAN RPJMD  
DAN RPJMN 2017**

***DANA DESA***

# PRIORITAS PENGGUNAAN DANA — DESA



# ALOKASI DAN PENYERAPAN DANA DESA TAHUN 2015 s.d 2017

01

## TAHUN 2015

Pagu sebesar Rp 20,7 Triliyun  
dengan jumlah Desa 74.093  
Terealisasi sebesar Rp 18,7  
(90,22%)

02.

## TAHUN 2016

Pagu sebesar Rp 46,98 Triliyun  
dengan jumlah Desa 74.754  
Terealisasi sebesar Rp 46,902  
Triliyun (99,83%)

03.

## TAHUN 2017

Pagu sebesar Rp 60 Triliyun  
dengan jumlah Desa 74.910

***PEMBANGUNAN DI WILAYAH  
PERBATASAN***

# ARAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN PERBATASAN DAERAH

UUD 45  
UU 43/2008  
UU 23/ 2014

NAWA  
CITA

RPJMN  
2015-  
2019

STRATEGI

PRIORITAS

PENDANAAN

TARGET

LANDASAN  
HUKUM

MEMBANGUN  
INDONESIA DARI  
PINGGIRAN  
DENGAN  
MEMPERKUAT  
DAERAH-  
DAERAH DAN  
DESA DALAM  
KERANGKA  
NEGARA  
KESATUAN

MEWUJUDKAN  
HALAMAN DEPAN  
NEGARA SEBAGAI  
PINTU GERBANG  
AKTIVITAS  
EKONOMI DAN  
PERDAGANGAN  
DENGAN NEGARA  
TETANGGA

1. PENYELESAIAN DAN PENEKASAN BATAS WILAYAH NEGARA (12 SEGMENT BERMASALAH) DAN
2. PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN DENGAN PRIORITAS 10 PKSN (DARI 26 PKSN) DAN 187 LOKPRI, PADA 41 KAB/KOTA DAN 13 PROV. (DARI 778 KECAMATAN, 134 KAB/KOTA, 23 PROV)

1. PENGAMANAN BATAS WILAYAH DARAT, LAUT, DAN UDARA
2. PENINGKATAN KUALITAS DIPLOMASI DAN KERJASAMA BATAS WILAYAH NEGARA.
3. KOORDINASI PENGELOLA PERBATASAN NEGARA
4. PENGEMBANGAN 10 PKSN DAN PERDAGANGAN LINTAS BATAS NEGARA
5. MEMBUKA ISOLASI LOKPRI, (INFRASTRUKTUR, SDM, EKONOMI)
6. PEMBANGUNAN
7. PLBN TERPADU

1. APBN
2. APBD,
3. CSR,
4. PERAN MASYARAKAT

1. MENJAMIN KEUTUHAN, PENEKAKAN NKRI
2. PENEKAKAN PERTAHANAN, KEAMANAN, INTERNASIONAL DAN REGIONAL
3. PENDAYAGUNAA N SUMBERDAYA DAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN
4. PENINGKATAN DAYA SAING MASYARAKAT UNTUK SEJAJAR ATAU LEBIH UNGGUL DARI AKTIFITAS SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT NEGARA TETANGGA

# SASARAN PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN TA. 2017

## **SASARAN /PROGRAM PRIORITAS**

1. PERCEPATAN PENYELESAIAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH NEGARA (DARAT, LAUT, DAN UDARA);
2. PEMBANGUNAN SARPRAS SOSIAL DASAR (PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN PERUMAHAN);
3. PEMBANGUNAN SARPRAS PEREKONOMIAN SEKTOR UNGGULAN (PERTANIAN, KEMARITIMAN, INDUSTRI, KEHUTANAN, PARIWISATA);
4. PEMBANGUNAN SARPRAS KEWILAYAHAN (INFRASTRUKTUR JALAN, TRANSPORTASI, ELEKTRIVIKASI DAN KOMUNIKASI);
5. PEMBANGUNAN SARPRAS PENDUKUNG STRATEGIS (PENGELOLAAN BATAS WIL.NEGARA, PENGAMANAN WIL, PLBN DAN PPKT)

## **TARGET LOKASI PEMBANGUNAN:**

- 10 PUSAT KEGIATAN STRATEGIS NASIONAL (PKSN)
- 150 KECAMATAN LOKASI PRIORITAS (LOKPRI)
- 7 POS LINTAS BATAS NEGARA (PLBN) TERPADU DAN KAWASAN PENDUKUNG PLBN



# RINCIAN KEGIATAN

**KEDAULATAN PANGAN  
(INTEGRATED FARMING)**

**KEDAULATAN ENERGI  
(PEMBANGUNAN PLTS)**

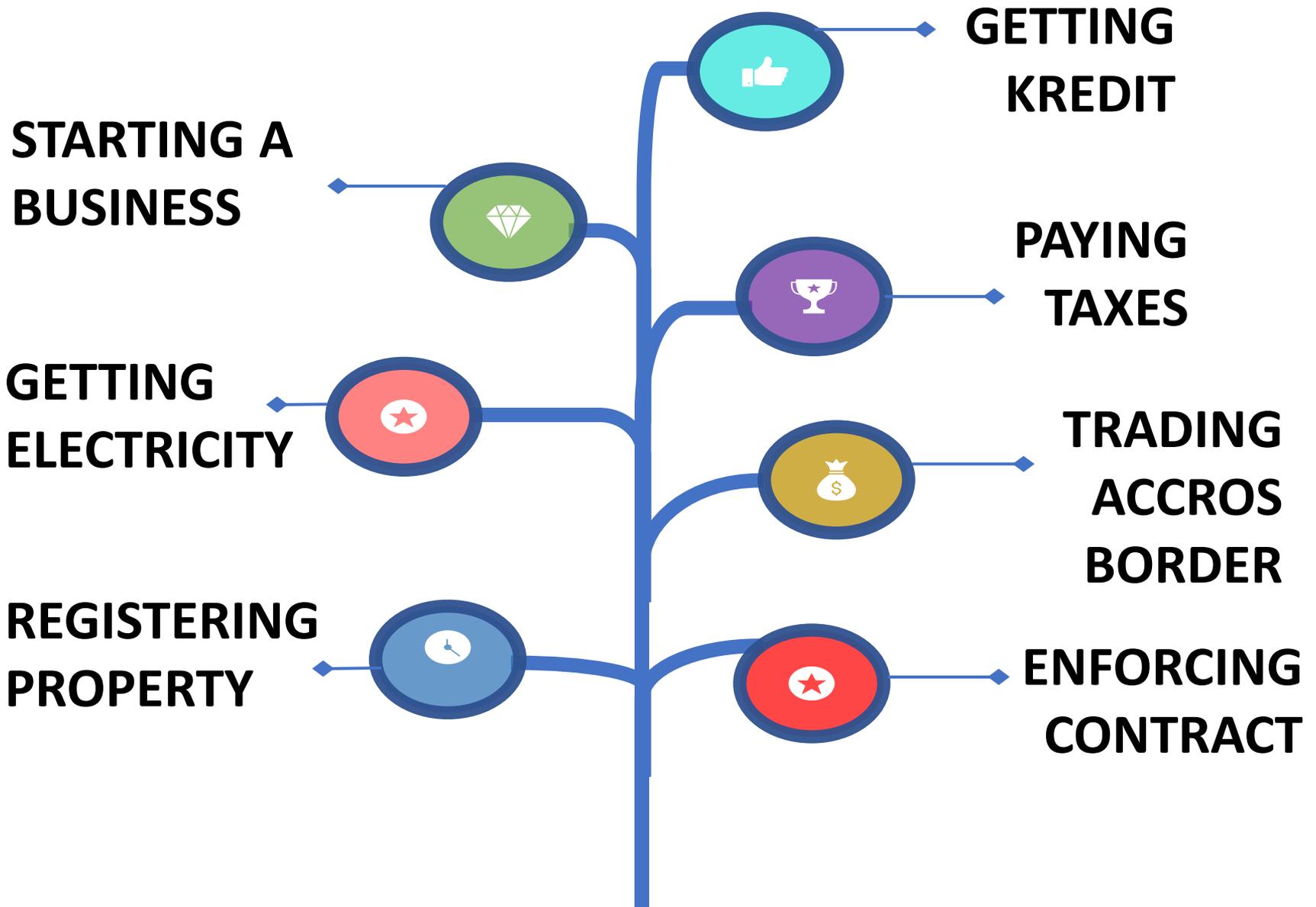
**INFRASTRUKTUR**

**KONEKTIVITAS (PEMB.BANDARA,  
TOL LAUT DAN TRANSPORTASI  
LAUT KWS.PERBATASAN)**

**KEDAULATAN WIL.(PERUNDINGAN  
BATAS, PEMB.SARPRAS HANKAM  
DAN OPERASI PENGAMANAN)**

***KEMUDAHAN BERINVESTASI  
DI DAERAH***

# 7 INDIKATOR KEMUDAHAN USAHA



# PELAYANAN TERPADU SATU — PINTU



# ***REFORMASI HUKUM***

# PEMBATALAN PERATURAN



## PEMBATALAN PERATURAN (PRIORITAS YANG MENGHAMBAT INVESTASI 3.143)

NO	KETERANGAN	JUMLAH
1.	PERMENDAGRI / INMENDAGRI yang Dibatalkan oleh Mendagri	111
2.	PERDA / PERKADA PROVINSI yang Dibatalkan oleh Mendagri	1.765
3.	PERDA / PERKADA KABUPATEN/KOTA Dibatalkan oleh Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat	1.267
<b>TOTAL</b>		<b>3.143</b>

## KLASIFIKASI PERATURAN YANG DIBATALKAN

NO	KETERANGAN	JUMLAH
1.	MENGHAMBAT INVESTASI (PERIZINAN, RETRIBUSI JASA USAHA, IMB, DLL)	1736 (55%)
2.	PENGALIHAN URUSAN, BUMD, DLL, DIKARENAKAN TIDAK SESUAI ATURAN DI ATASNYA	1.091 (35%)
3.	MENGHAMBAT PELAYANAN PUBLIK	316 (10%)
<b>TOTAL</b>		<b>3.143</b>

## PEMBATALAN PERMENDAGRI / INMENDAGRI PER OKTOBER 2016

NO	KETERANGAN	JUMLAH
1.	Tahap I	111
2.	Tahap II	47
<b>TOTAL</b>		<b>158</b>

***STANDAR PELAYANAN  
MINIMAL***

# HAL YANG DIHARAPKAN



1

Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengintervensi pemenuhan kebutuhan dasarnya tersebut

Sebagai contoh: tidak akan ada lagi warga negara Indonesia pada usia sekolah, yang tidak bersekolah sampai dengan pendidikan menengah karena tidak mampu.

2

Pemerintah Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah

***INOVASI DAERAH***

# INOVASI DAERAH

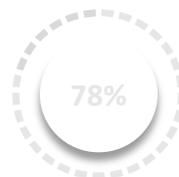
**DISKRESI**

**PEMERINTAH MENDORONG PROGRAM INOVASI**



**INOVASI SESUAI KARAKTERISTIK DAERAH**

**MENGACU PD PRINSIP PENINGKATAN EFISIENSI DAN PERBAIKAN EFEKTIVITAS.**



# TERIMA KASIH



KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
JL. Medan Merdeka Utara No. 7  
Jakarta Pusat, 101101  
Telp/Fax: (021) 3459339